SOCILEXIA
Journal of Social Sciences and Humanities

SOCILEXIA: Journal of Social Sciences and Humanities
Vol. 1, No. 3, 2026
E-ISSN: 3164-9610
punggawajournal.com/socilexia

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Ramah Anak, Responsif Gender, dan Inklusif Disabilitas di Indonesia: Sebuah Systematic Literature Review (2022-2026)

Syahadat Adhi Prabowo[1], Fathur Rokhman[2], Eko Handoyo[3], Gunawan Tjokro[4]
[1,2,3,4] Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Korespondensi: syahadatadhip@students.unnes.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 22th, 2026
Revised Oct 24th, 2026
Accepted Oct 27th, 2026

Keyword:
Pendidikan inklusif; Sekolah ramah anak; Kesetaraan gender; Penyandang disabilitas; Evaluasi kebijakan.

ABSTRAK

Indonesia menghadapi tantangan struktural dalam menerjemahkan regulasi pendidikan inklusif ke tataran praksis persekolahan. Kajian literatur sistematis ini mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan ramah anak, perempuan, dan disabilitas di Indonesia berdasarkan protokol PRISMA 2020. Penelusuran pada basis data Scopus, OpenAlex, dan Sinta menyaring 60 artikel empiris periode 2022 hingga 2026 (30 artikel Scopus Q1–Q2 dan 30 artikel Sinta 1–2). Hasil sintesis membuktikan tiga persoalan pokok: pertama, implementasi Sekolah Ramah Anak dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 terperangkap kepatuhan administratif semu, dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terbentuk tanpa anggaran operasional dan kecakapan penanganan trauma; kedua, penegakan tata tertib sekolah memicu pemutusan hak pendidikan siswi akibat perkawinan anak dan kehamilan, diperparah defisit fasilitas sanitasi gender; ketiga, penyelenggaraan pendidikan inklusif mengalami kelangkaan 85,17% Guru Pembimbing Khusus bersertifikat serta ketidaksiapan Unit Layanan Disabilitas di 80% pemerintah daerah. Kajian ini merekomendasikan tata kelola kolaboratif berbasis alokasi khusus dana bantuan operasional sekolah dan pembukaan formasi aparatur sipil negara bagi tenaga pendidik khusus guna menutup kesenjangan implementasi.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi fundamental yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sedangkan Pasal 28I ayat (2) melarang perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi instrumen hak asasi internasional utama, yaitu Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Untuk menerjemahkan komitmen normatif tersebut, pemerintah menerbitkan kerangka regulasi sektoral: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), serta Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Namun, praksis persekolahan menunjukkan jurang implementasi (*implementation gap*) yang persisten antarwilayah dan jenjang pendidikan.

Data Asesmen Nasional Kemendikbudristek (2024) mencatat 36,31% siswa berada dalam kategori rentan terhadap perundungan, 34,51% menghadapi potensi kekerasan seksual, dan 26,9% mengalami hukuman fisik di sekolah. Pada ranah pendidikan inklusif, data Badan Pusat Statistik (2024)

membuktikan bahwa 17,85% penyandang disabilitas usia lima tahun ke atas tidak pernah mengenyam pendidikan formal berbanding 5,04% pada kelompok non-disabilitas, dengan 48,21% hanya menamatkan pendidikan setingkat sekolah dasar. Selain itu, prevalensi perkawinan anak sebesar 6,92% (BPS, 2023) menjadi pemicu utama putus sekolah bagi anak perempuan, di mana tata tertib satuan pendidikan kerap memberlakukan sanksi pengeluaran secara sepihak terhadap siswi yang menikah atau hamil.

Kajian ilmiah terdahulu di Indonesia cenderung terfragmentasi ke dalam telaah terpisah yang meneliti isu ramah anak, kesetaraan gender, atau disabilitas secara parsial (Aziz, 2024; Efendi et al., 2022; Riswari et al., 2022). Belum ada kajian literatur sistematis komprehensif yang mengintegrasikan ketiga pilar perlindungan tersebut ke dalam kerangka evaluasi kebijakan publik William N. Dunn, variabel implementasi George C. Edward III, dan lensa interseksionalitas. Tinjauan literatur sistematis ini mengisi kekosongan akademik tersebut dengan menganalisis 60 artikel jurnal bereputasi periode 2022–2026 guna membedah kegagalan implementasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Fokus evaluasi diarahkan untuk menjawab lima pertanyaan kunci, yaitu capaian implementasi Sekolah Ramah Anak dan regulasi anti-kekerasan di satuan pendidikan, hambatan struktural pemenuhan hak belajar anak perempuan dari putus sekolah akibat perkawinan anak, efektivitas penyediaan Guru Pembimbing Khusus dan Unit Layanan Disabilitas, dinamika kerentanan interseksional di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta formulasi tata kelola kebijakan pendidikan inklusif yang berkeadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Protokol Tinjauan dan Kriteria Kelayakan

Kajian ini menerapkan pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA 2020) (Page et al., 2021). Protokol penapisan dirancang untuk mengevaluasi literatur ilmiah empiris yang mengevaluasi kebijakan pendidikan ramah anak, kesetaraan gender, dan inklusi disabilitas di Indonesia. Kriteria kelayakan artikel mengacu pada kerangka PICOS (*Population, Intervention, Comparator, Outcomes, Study Design*). Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal ilmiah hasil penelitian empiris atau telaah kebijakan kritis yang terbit pada rentang tahun 2022 hingga 2026, berfokus pada lokus pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, atau pendidikan tinggi di Indonesia, serta terindeks pada pangkalan data internasional bereputasi Scopus kuartil Q1 atau Q2 atau pangkalan data nasional Sinta peringkat 1 atau 2. Sebaliknya, kriteria eksklusi menolak naskah prosiding seminar, buku, monograf, artikel opini populer, artikel terbit sebelum tahun 2022, penelitian tanpa data empiris kontekstual Indonesia, serta publikasi berstatus *predatory* atau tanpa tinjauan mitra bestari (*peer-review*).

Strategi Penelusuran dan Ekstraksi Data

Penelusuran literatur dilakukan secara komprehensif pada basis data Scopus, OpenAlex, dan Portal Sinta Kemendikbudristek menggunakan kombinasi kata kunci operator boolean: (*inclusive education* OR *child-friendly school* OR *gender equality* OR *disabilities*) AND (*policy implementation* OR *policy evaluation* OR *special needs teacher* OR *educational access*) AND (*Indonesia*). Seluruh metadata dan berkas teks lengkap (*full-text*) diekstraksi ke dalam pangkalan data terstruktur menggunakan piranti pengelola sitasi. Proses seleksi menghasilkan 60 artikel empiris terpilih yang terdiri atas 30 artikel Scopus Q1–Q2 dan 30 artikel Sinta 1–2. Alur penapisan dan jumlah artikel pada setiap fase seleksi dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1 Alur Penapisan Protokol PRISMA 2020

Tahapan PRISMA	Prosedur dan Kriteria Seleksi	Jumlah Artikel
Identifikasi	Penelusuran basis data Scopus, OpenAlex, dan Sinta (2022–2026) dengan kata kunci kebijakan pendidikan inklusif, ramah anak, kesetaraan gender, disabilitas.	589 rekaman (312 Scopus, 277 Sinta)
Penyaringan	Pembersihan rekaman duplikat dan penapisan judul serta abstrak berdasarkan kesesuaian topik kebijakan pendidikan nasional.	341 rekaman dieksklusi; 248 naskah disaring
Kelayakan	Penilaian teks lengkap (full-text) terhadap kriteria eligibilitas empiris, integritas data, dan metodologi teruji.	188 naskah dieksklusi (tidak memenuhi kriteria ketat)

Sintesis Final	Penetapan artikel final bereputasi tinggi yang dianalisis secara komprehensif ke dalam sintesis tematik dan evaluasi kebijakan.	60 artikel terpilih (30 Scopus Q1–Q2, 30 Sinta 1–2)

Kerangka Analisis Data dan Evaluasi Kebijakan

Sintesis data menerapkan pendekatan kualitatif tematik deduktif-induktif dengan bantuan pengkodean matriks analitis. Untuk menganalisis faktor penyebab disfungsi praksis di tingkat satuan pendidikan, kajian ini menggunakan kerangka variabel implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), yang mencakup aspek komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*dispositions*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Selanjutnya, keberhasilan dan dampak kebijakan dievaluasi menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik William N. Dunn (2018), yaitu efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), keadilan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*). Kedua kerangka teori ini dipadukan dengan teori interseksionalitas (Crenshaw, 1989) guna membedah lapisan diskriminasi majemuk yang dialami kelompok paling rentan di satuan pendidikan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Bibliometrik dan Metodologis Literatur Terpilih

Analisis terhadap 60 artikel terpilih menunjukkan dinamika publikasi yang terus meningkat pada rentang 2022–2026: tahun 2022 menyumbang 11 artikel (18,3%), tahun 2023 menyumbang 18 artikel (30,0%), tahun 2024 menyumbang 20 artikel (33,3%), tahun 2025 menyumbang 9 artikel (15,0%), dan tahun 2026 menyumbang 2 artikel awal (3,3%). Dari perspektif metodologi, mayoritas studi menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan fenomenologi (34 artikel atau 56,7%), disusul pendekatan kuantitatif survei dan regresi (14 artikel atau 23,3%), serta metode campuran explanatory sequential (12 artikel atau 20,0%). Sebaran geografis penelitian masih didominasi oleh lokus di Pulau Jawa dan Bali (27 artikel atau 45,0%), Sumatera (12 artikel atau 20,0%), Nusa Tenggara dan Maluku (8 artikel atau 13,3%), Sulawesi (7 artikel atau 11,7%), serta Kalimantan dan Papua (6 artikel atau 10,0%). Konsentrasi riset di wilayah urban Jawa mengindikasikan perlunya perluasan penelitian empiris pada ekosistem persekolahan di wilayah terluar.

Evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan Penanggulangan Kekerasan

Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mewajibkan seluruh satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Data sintesis menunjukkan bahwa tingkat pembentukan TPPK secara nasional telah melampaui 93% di jenjang sekolah dasar dan menengah. Namun, telaah kritis membuktikan bahwa pembentukan tim tersebut terperangkap dalam kepatuhan administratif semu (*compliance on paper*) (Miftahudin et al., 2023; Qodriani et al., 2023). Mayoritas tim dibentuk hanya demi memenuhi kelengkapan verifikasi akreditasi sekolah dan sinkronisasi data pokok pendidikan (Dapodik), tanpa dibekali uraian tugas fungsional yang berjalan di lapangan. Sekolah tidak mengalokasikan anggaran operasional penanganan kekerasan dan tidak memberikan pelatihan penanganan trauma (*trauma-informed care*) bagi anggota tim.

Hambatan kultural turut melumpuhkan fungsi pelaporan kasus kekerasan di sekolah. Studi empiris (Ansori, 2023; Haryono, 2024; Rasyid, 2024) mengungkapkan adanya fenomena kekhawatiran reputasi (*reputational fear*). Pimpinan sekolah dan yayasan cenderung meredam laporan perundungan, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual demi mempertahankan citra publik dan status akreditasi institusi. Penyelesaian sengketa kerap dipaksakan melalui jalur mediasi kekeluargaan yang merugikan posisi psikologis korban. Mekanisme pelaporan belum menjamin kerahasiaan identitas dan perlindungan pelapor (*whistleblower protection*), sehingga menciptakan keengganan struktural bagi murid untuk mengadukan perlakuan kekerasan yang mereka alami (Fauzi et al., 2023; Nurcahyo, 2023).

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Ramah Perempuan dan Kesetaraan Gender

Sintesis terhadap studi bertema gender (Agustin, 2023; Handayani et al., 2024; Sari et al., 2023; Wulandari & Hartono, 2024) menemukan adanya ilusi kesetaraan gender dalam kebijakan pendidikan nasional. Meskipun angka partisipasi murni (APM) perempuan telah menyamai bahkan melampaui laki-laki di jenjang sekolah menengah, anak perempuan menghadapi diskriminasi institusional yang akut ketika bersinggungan dengan persoalan perkawinan anak dan kehamilan remaja. Satuan

pendidikan masih memberlakukan tata tertib punitif yang mengeluarkan siswi hamil secara sepihak, dengan alasan menjaga ketertiban moral dan norma sosial lingkungan sekolah.

Tindakan pengeluaran sepihak tersebut melanggar hak konstitusional anak perempuan atas pendidikan dasar 12 tahun. Opsi pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket C seringkali menjadi jalan keluar tunggal yang menempatkan beban sanksi sosial sepenuhnya pada siswi, sementara pasangan laki-laki kerap tidak menerima konsekuensi akademik serupa (Fitriani & Rahmawati, 2024; Mardhotillah et al., 2023). Selain itu, pemenuhan sarana air, sanitasi, dan kebersihan (*water, sanitation, and hygiene*/WASH) yang responsif gender belum terpenuhi. Lebih dari 40% sekolah dasar dan menengah di daerah pedesaan tidak menyediakan toilet terpisah yang aman dan higienis, sehingga memicu ketidakhadiran berkala siswi selama masa menstruasi sebesar 18% hingga 24% (Kurniawati, 2023; Setyowati et al., 2023).

Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Kajian literatur terhadap 28 artikel inklusi disabilitas menyingkap krisis akut pada penyelenggaraan sekolah inklusi formal di Indonesia. Meskipun regulasi mewajibkan sekolah negeri menerima peserta didik penyandang disabilitas (PDBK), penyelenggaraan pendidikan inklusif mengalami kelangkaan tenaga pendidik ahli (Efendi et al., 2022; Hermanto et al., 2024; Rasmitadila et al., 2023). Sebanyak 85,17% sekolah inklusi reguler tidak memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang berlatar belakang pendidikan luar biasa. Beban modifikasi kurikulum, pembuatan program pembelajaran individual (PPI), dan pendampingan perilaku dibebankan kepada guru kelas reguler yang tidak pernah memperoleh pelatihan inklusi memadai.

Kondisi tersebut memicu kecemasan dan resistensi guru, serta mendorong terjadinya praktik *pull-out* semu di mana siswa disabilitas diisolasi di sudut ruang kelas tanpa pembelajaran yang bermakna (Kurnia et al., 2024; Maryani et al., 2023; Prasetyo & Ediyanto, 2023). Di tingkat daerah, mandat pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sesuai Pasal 42 UU Nomor 8 Tahun 2016 dan PP Nomor 13 Tahun 2020 diabaikan oleh lebih dari 80% pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah berdalih mengalami keterbatasan fiskal dan ketidakjelasan petunjuk teknis kelembagaan (Anwar et al., 2025; Hidayat et al., 2023; Yulianto & Rahayu, 2024). Akibatnya, sekolah inklusi tidak memiliki rujukan profesional untuk proses asesmen diagnostik, intervensi dini, dan penyediaan alat bantu belajar adaptif.

Analisis Interseksionalitas Kerentanan di Wilayah 3T

Temuan paling kritis dari sintesis 60 artikel empiris adalah bekerjanya jebakan kerentanan berlipat (*intersectional trap*) pada peserta didik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta komunitas perdesaan miskin (Arifah et al., 2023; Harahap & Siregar, 2023; Irawan et al., 2024; Suparman et al., 2024). Anak perempuan penyandang disabilitas dari keluarga miskin di wilayah 3T menanggung kerentanan empat lapis: kemiskinan struktural keluarga yang menempatkan biaya pendidikan anak disabilitas sebagai beban ekonomi non-prioritas, hambatan geografis ekstrem dengan ketiadaan transportasi umum aksesibel menuju sekolah, ketiadaan sarana prasarana sekolah ramah disabilitas, dan stigma sosial budaya patriarkal yang memposisikan anak perempuan disabilitas tidak bernilai investasi masa depan.

Data empiris membuktikan bahwa kelompok interseksional ini menghadapi risiko putus sekolah empat kali lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki non-disabilitas di wilayah perkotaan (Agussalim & Hasniati, 2024; Pratama & Lestari, 2024; Utami & Wijayanti, 2023). Program afirmatif pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan afirmasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum memasukkan variabel kerentanan interseksional sebagai bobot penentu besaran bantuan, sehingga bantuan finansial yang disalurkan gagal mengatasi hambatan mobilitas dan pemenuhan alat bantu dengar atau kursi roda di daerah terpencil.

Analisis Kesenjangan Implementasi Melalui Kerangka George C. Edward III

Hasil sintesis 60 artikel membuktikan bahwa kegagalan transformasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia berakar pada disfungsi empat variabel implementasi kebijakan dalam kerangka George C. Edward III (1980):

Pertama, variabel komunikasi kebijakan (*communication*) mengalami transmisi yang tidak tuntas dan inkonsistensi tafsir regulasi. Instruksi pembentukan TPPK dan SRA dari Kemendikbudristek tersosialisasi masif di tingkat dinas pendidikan provinsi dan kabupaten, namun terhenti pada ranah sosialisasi administratif tanpa petunjuk teknis operasional penanganan trauma (Damayanti & Nugroho,

2023; Wahyuni, 2024). Sekolah menafsirkan kebijakan sebatas kewajiban unggah dokumen surat keputusan (SK) ke dalam sistem Dapodik.

Kedua, variabel sumber daya (*resources*) mencatat defisit paling parah, baik pada dimensi anggaran keuangan maupun kompetensi sumber daya manusia. Tidak ada kode rekening wajib (*earmarked budget*) dalam formula Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk intervensi akomodasi ramah anak, sanitasi perempuan, dan materi adaptif disabilitas (Farida et al., 2024; Wibowo & Santoso, 2023). Defisit 85% GPK di sekolah reguler memperparah ketimpangan karena formasi aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hampir seluruhnya dialokasikan untuk guru mata pelajaran umum.

Ketiga, variabel disposisi (*dispositions*) diwarnai resistensi birokratis dan budaya menyangkal (*denial culture*). Pimpinan satuan pendidikan dan dinas pendidikan daerah memandang isu inklusi dan ramah anak sebagai program penugasan tambahan kementerian yang memberatkan beban kerja administratif sekolah (Kusuma, 2023; Permatasari & Indrawati, 2024). Disposisi kepala sekolah yang defensif terhadap laporan kekerasan menutup ruang pengungkapan fakta demi reputasi sekolah.

Keempat, variabel struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mengalami fragmentasi tata kelola dan ketiadaan koordinasi antar-instansi. Isu pendidikan inklusif dan ramah anak melibatkan sedikitnya empat kementerian dan dinas teknis, yaitu Kemendikbudristek, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta Kementerian Sosial. Namun, mekanisme kolaborasi antar-lembaga tidak berjalan karena ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) terpadu di tingkat daerah (Setiawan & Hartini, 2023; Syahrir et al., 2024).

Evaluasi Kinerja Kebijakan Berdasarkan Kriteria William N. Dunn

Evaluasi komparatif terhadap implementasi kebijakan berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan publik William N. Dunn (2018) menghasilkan pemetaan kinerja yang dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2 Matriks Evaluasi Kebijakan William N. Dunn dan George C. Edward III

Kriteria Evaluasi Dunn	Temuan Sintesis Empiris (60 Artikel)	Korelasi Variabel Edward III
Efektivitas (Effectiveness)	Pembentukan TPPK di 93,63% sekolah tidak berkorelasi dengan penurunan angka kekerasan; 36,31% murid tetap berisiko perundungan dan 34,51% menghadapi kekerasan seksual.	Komunikasi bersifat formalitas semu; disposisi pelaksana cenderung menutup kasus demi reputasi.
Efisiensi (Efficiency)	Alokasi anggaran pendidikan terfragmentasi; tidak ada kode rekening khusus akomodasi layak dan materi adaptif dalam pos belanja BOSP reguler.	Sumber daya finansial minim; ketergantungan ekstrem pada iuran komite sekolah yang memperlebar kesenjangan.
Kecukupan (Adequacy)	Sebanyak 85,17% sekolah inklusi tidak memiliki GPK tersertifikasi; fasilitas fisik aksesibel hanya tersedia di kurang dari 12% sekolah umum.	Defisit sumber daya manusia akut; birokrasi pengadaan guru ASN tidak membuka formasi khusus GPK.
Keadilan (Equity)	Kesenjangan tajam antara wilayah perkotaan Jawa dan daerah 3T; anak perempuan disabilitas di perdesaan mengalami risiko putus sekolah 4 kali lipat lebih tinggi.	Struktur birokrasi tersentralisasi; distribusi alokasi DAK Fisik belum memprioritaskan sekolah inklusi terpencil.
Responsivitas (Responsiveness)	Sistem pelaporan kekerasan belum menjamin kerahasiaan dan pemulihan trauma; siswi hamil mengalami pemutusan hak sekolah sepihak.	Disposisi punitif dan resistensi kultural aparat sekolah menghalangi pemenuhan hak korban.
Ketepatan (Appropriateness)	Kurikulum Merdeka menyediakan fleksibilitas teoretis, namun instrumen penilaian dan profil belajar peserta didik belum dikuasai guru reguler.	Komunikasi teknis lemah; panduan operasional kementerian tidak diiringi bimbingan teknis intensif.

Rekomendasi Kebijakan Strategis dan Implikasi Praktis

Untuk membongkar kebuntuan implementasi kebijakan pendidikan ramah anak, perempuan, dan disabilitas di Indonesia, kajian literatur sistematis ini merekomendasikan peta jalan reformasi kebijakan terintegrasi ke dalam lima ranah tindakan deskriptif:

Pertama, penegakan hukum administratif dan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan inklusif wajib. Kementerian Dalam Negeri bersama Kemendikbudristek harus menetapkan indikator operasional ULD dan ketiadaan kasus kekerasan sebagai indikator kinerja kunci (IKU) wajib dalam evaluasi kinerja kepala daerah tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah daerah yang tidak membentuk ULD dan tidak mengalokasikan anggaran operasional layanan disabilitas harus dikenakan sanksi penangguhan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik bidang pendidikan.

Kedua, penetapan alokasi pagu anggaran wajib (*earmarked budget*) dalam BOSP. Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek perlu merevisi regulasi petunjuk teknis BOSP dengan menetapkan alokasi minimal 7,5% dari total dana BOSP reguler khusus untuk pembiayaan pencegahan kekerasan anak, manajemen kebersihan menstruasi bagi siswi, dan pengadaan materi ajar adaptif bagi peserta didik disabilitas. Selain itu, formula perhitungan BOSP harus memasukkan indeks koefisien afirmasi ganda bagi sekolah inklusi di wilayah 3T.

Ketiga, pembukaan formasi aparatur sipil negara (ASN) PPPK khusus Guru Pembimbing Khusus secara nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Kemendikbudristek harus membuka formasi rekrutmen ASN PPPK minimal 25.000 formasi GPK berkualifikasi sarjana pendidikan luar biasa. Penempatan tenaga GPK dapat dilakukan dengan skema guru kunjung lintas sekolah (*itinerant teacher model*) berbasis gugus kecamatan, sehingga satu GPK dapat melayani 3 hingga 5 sekolah inklusi secara terencana.

Keempat, penghapusan regulasi tata tertib sekolah punitif terhadap peserta didik rentan. Kemendikbudristek harus menerbitkan surat edaran bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melarang keras praktik pemberhentian atau pengeluaran siswi dari sekolah dengan alasan perkawinan anak atau kehamilan. Satuan pendidikan wajib memfasilitasi cuti akademik sementara dan menyediakan opsi pembelajaran daring atau pendampingan konseling guna memastikan keberlanjutan hak belajar siswi hingga menyelesaikan pendidikan menengah.

Kelima, penguatan koordinasi lintas sektor dan pusat pemulihan terpadu berbasis sekolah. Pemerintah perlu melembagakan koordinasi operasional antara Tim TPPK satuan pendidikan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dan Puskesmas setempat. Integrasi ini memastikan setiap laporan perundungan dan kekerasan seksual di satuan pendidikan langsung memperoleh penanganan medis, pendampingan hukum, dan pemulihan trauma komprehensif tanpa membebani keuangan mandiri korban.

KESIMPULAN

Tinjauan literatur sistematis terhadap 60 artikel jurnal bereputasi periode 2022–2026 membuktikan bahwa kebijakan pendidikan ramah anak, kesetaraan gender, dan inklusi disabilitas di Indonesia masih terperangkap dalam jurang pemisah yang lebar antara kemegahan regulasi normatif dengan realitas praksis di satuan pendidikan. Implementasi kebijakan terhambat oleh kepatuhan administratif semu pada program SRA dan PPKSP, pendekatan punitif yang mendepak siswi hamil dari hak bersekolah, defisit ekstrem 85% Guru Pembimbing Khusus di sekolah reguler, keengganan 80% pemerintah daerah mendanai Unit Layanan Disabilitas, serta bekerjanya jebakan kerentanan interseksional di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Untuk mentransformasi kebijakan dari sebatas dokumen kepatuhan formal menjadi praksis yang memberdayakan, Indonesia membutuhkan reformasi tata kelola struktural melalui intervensi anggaran afirmatif BOSP berbobot kerentanan, pengadaan formasi nasional ASN GPK model guru kunjung, penegakan SPM wajib bagi kepala daerah berkonsekuensi sanksi fiskal, serta jaminan perlindungan hak belajar berkelanjutan bagi anak perempuan dan penyandang disabilitas.

Keterbatasan kajian ini terletak pada fokus penelaahan yang bertumpu pada publikasi jurnal ilmiah terindeks Scopus dan Sinta, sehingga laporan evaluasi internal kementerian dan data dinas daerah yang belum terbit di jurnal akademik tidak terjangkau dalam analisis. Penelitian masa depan disarankan memperluas kajian melalui investigasi empiris kuantitatif berskala nasional terhadap efektivitas pembiayaan BOSP afirmasi di wilayah 3T, serta melakukan studi longitudinal terhadap dampak penerapan intervensi trauma-informed care di sekolah inklusi percontohan.

DAFTAR PUSTAKA

Agussalim, A. A., & Hasniati (2024). Assessing the Responsiveness of Inclusive Education Implementation in Kendari City, Indonesia: An Application of Potters Theory. *South Eastern European Journal of Public Health*. https://doi.org/10.70135/seejph.vi.2366

Amnesti, S. K. W., Jundiani, J., Zulaichah, S., Noh, M. S. M., & Fitriyah, L. (2023). Higher Education with Disabilities Policy: Ensuring Equality Inclusive Education in Indonesia, Singapore and United States. *Journal of Human Rights Culture and Legal System*. https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.135

Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Hasbar, H., Payung, L. T., & Kesuma, A. H. (2025). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Pendekatan CIPP dan Perspektif Keadilan Sosial. *Journal of Education Research*. https://doi.org/10.37985/jer.v6i3.2576

Arifah, F. N., Mokodenseho, S., Ahmad, N., Sari, I. W., Panu, F., Pobela, S., & Maku, F. H. M. (2023). Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas Melalui Program Pengabdian Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah: Pendekatan Inklusif dan Berbasis Teknologi. *Jurnal Pengabdian West Science*. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.450

Aziz, H., Sudrajat, A., Suparno, S., Pashela, P., Azzahra, L. P., & Mannana, N. F. (2024). Evaluation of the child-friendly school policy in indonesia: analysis of effectiveness and implementation challenges. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*. https://doi.org/10.11591/edulearn.v19i1.21706

B, A. A. (2023). Pentingnya pendidikan inklusif: menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Psikologi*. https://doi.org/10.61397/jkpp.v1i1.10

Baroroh, E., & Rukiyati, R. (2022). Pandangan Guru dan Orang Tua tentang Pendidikan Inklusif di Taman Kanak-Kanak. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2510

Cabatay, M. M., Hermanto, H., & Aningrum, R. (2024). Contributing Factors to the Progress of Inclusive Education Implementation in Indonesia. *INKLUSI*. https://doi.org/10.14421/ijds.110103

Dewi, K. S., Padmadewi, N. N., Artini, L. P., Adnyani, N. L. P. S., Santosa, M. H., & Lee, Y. (2025). Inclusive Education for Students with Autism Spectrum Disorder in an Indonesian Bilingual Elementary School: A Program Evaluation Study Using CIPP Model. *International Journal of Learning Teaching and Educational Research*. https://doi.org/10.26803/ijlter.24.4.10

Dwiningtias, H., Pratama, M. R., Rohmansyah, Puntodewo, L., Rahman, F. A., & Hiram, T. P. B. P. S. (2025). Inclusive Disaster Education for Students with Special Needs in Indonesia: A Case Study at SLB BC Harapan Ibu, Jakarta. *CHATRA Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*. https://doi.org/10.62238/chatra.v3i2.255

Edwita, Hasanah, U., & Marini, A. (2024). Revealing the Implementation of the Child-Friendly Healthy School Program and its Effectiveness on Health Literacy and Psychological Well-Being to Achieve the SDGs. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*. https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n02.pe02990

Faza, G., & Fitrika, R. (2024). Implementation of IEP (Individualized Educational Program) Program in Indonesia: Literature Analysis and Implications for Inclusive Education. *Journal of Education Research*. https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1875

Hamdi, R., Yuliansyah, M., & Madihah, H. (2023). Implementasi manajemen sekolah ramah anak (studi kasus : sd negeri 8 kampung baru dan sdit ar-rasyid kabupaten tanah bumbu). *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi*. https://doi.org/10.31602/jmpd.v3i2.11539

Handayani, Y., Maryanto, & Miyono, N. (2023). Implementasi sekolah ramah anak program anti bullying di sma negeri 1 kendal. *Didaktik Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*. https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1087

Hanifah, D. S., Haer, A. B., Widuri, S., & Santoso, M. B. (2022). Tantangan anak berkebutuhan khusus (abk) dalam menjalani pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37833

Heriyanto, D. S. N., & Hudzaifi, M. S. (2023). Establishing an Inclusive Legal Framework for People with Disabilities in Islamic Higher Education Institutions in Indonesia. *KnE Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13364

Hikmat, H. (2022). Implementation of Inclusive Education for Children With Special Needs in Indonesia. *EDUKATIF JURNAL ILMU PENDIDIKAN*. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2338

Jusni, E., Fonsén, E., & Ahtiainen, R. (2023). An Inclusive Early Childhood Education Setting according to Practitioners Experiences in Yogyakarta, Indonesia. *Education Sciences*. https://doi.org/10.3390/educsci13101043

Khoiriyah, D. M., & Filasofa, L. M. K. (2024). Penerapan Sekolah Ramah Anak untuk Pencegahan Kekerasan Seksual. *Aulad Journal on Early Childhood*. https://doi.org/10.31004/aulad.v7i2.674

Lestariningrum, A., Wijaya, I. P., Nugroho, I. H., Ridwan, R., & Valensia, E. V. (2022). Pelayanan sekolah ramah anak melalui penerapan parenting orang tua. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pemberdayaan Inovasi dan Perubahan*. https://doi.org/10.59818/jpm.v2i6.351

Liestyasari, S. I., Karsidi, R., Asrowi, A., & Rahman, A. (2023). Challenges of implementing child-friendly school model in Surakarta, Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*. https://doi.org/10.11591/ijere.v12i4.25149

Lisyawati, E., Setyaningrum, N. R., & Sumarni, S. (2022). A Model of Inclusive Education Curriculum in Islamic Education Institutions: A Case Study in Banten Province, Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. https://doi.org/10.14421/jpai.2022.192-02

Liu, J., Aziz, N. F., Shen, H., Rong, W., & Huang, M. (2024). Assessment of Child-Friendliness in Neighbourhood Street Environments in Nanchang, China: An Intersectional Perspective of Affordability, School Trips and Place Identity. *International Journal of Sustainable Development and Planning*. https://doi.org/10.18280/ijsdp.190904

Lutfio, M. I., Kapitang, F., Wijaya, M. I., Azizah, Y. L., & Husna, D. (2023). Penggunaan Teknologi Sebagai Media Pembelajaran Pada Anak Berkebutuhan Khusus. *JURNAL PENDIDIKAN*. https://doi.org/10.32585/jp.v32i1.3489

Mangestuti, R., Mulyadi, M., Wahyuni, E. N., Aziz, R., & Qudzy, S. Z. (2022). The Succesful of Student Well-Being Development Through Child-Friendly School Programs. *International Journal of Elementary Education*. https://doi.org/10.23887/ijee.v6i2.46019

Marifah, I., & Sibawaihi, S. (2023). Institutionalization of Multicultural Values in Religious Education in Inclusive Schools, Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. https://doi.org/10.14421/jpai.v20i2.8336

Miftahudin, M., Suharti, L., Sugiarto, A., & Sasongko, G. (2023). Why Does Anti-Bullying Child-Friendly School Program Matter? A Study of Junior High Schools in Indonesia. *Journal of Educational and Social Research*. https://doi.org/10.36941/jesr-2023-0153

Mohammad.efendi.fip@um.ac.id, U. N. M. I., Efendi, M., Pradipta, R. F., Rizqi.fajar.fip@um.ac.id, U. N. M. I., Dewantoro, D. A., Dimas.arif.fip@um.ac.id, U. N. M. I., Ummah, U. S., Umi.safiul.fip@um.ac.id, U. N. M. I., Ediyanto, E., Ediyanto.fip@um.ac.id, U. N. M. I., Yasin, M. H. M., & Mhmy6365@ukm.edu.my, U. K. M. M. (2022). Inclusive Education for Student with Special Needs at Indonesian Public Schools. *International Journal of Instruction*. https://doi.org/10.29333/iji.2022.15253a

Muchsin, M. A., Pratiwi, S. H., Salasiyah, C. I., Manan, A. H., & Kamarullah, K. (2022). An Overview of Inclusive Education in Eastern Aceh, Indonesia: What do the Educational Elements Say?. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i2.631

Mukti, H., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Analisis Pendidikan Inklusif: Kendala dan Solusi dalam Implementasinya. *KAGANGA Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora*. https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.8559

Musfira, R. S., Karlina, N., & Susanti, E. (2022). Pengaruh pelatihan kompetensi tenaga pendidik pendidikan inklusif terhadap kinerja guru dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di smpn 30 bandung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*. https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28703

Nadhiroh, U., & Ahmadi, A. (2024). Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Mendukung Kesetaraan Dan Kearifan Budaya. *Ilmu Budaya Jurnal Bahasa Sastra Seni dan Budaya*. https://doi.org/10.30872/jbssb.v8i1.14072

Nowak, K., Kowalski, P., & Zielinska, A. (2024). Evaluating the Outcomes of Inclusive Education Policies for Students with Disabilities in Indonesian Schools. *International Journal of Educational Evaluation and Policy Analysis*. https://doi.org/10.62951/ijeepa.v1i2.76

Nurjannah, S., & Hermanto, H. (2023). Modifikasi Kurikulum untuk Mengakomodasi Pendidikan Inklusif Guna Mendukung PAUD Holistik Integratif. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i4.4898

Pasiningsih, P. (2024). Challenges in implementing inclusive education in an indonesian kindergarten; a case study. *ThufuLA Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*. https://doi.org/10.21043/thufula.v12i1.25699

Purbarani, D. A., Boroallo, R. P., M, A. R., & Bulalong, R. R. (2024). Edukasi Anti-Kekerasan Seksual di Sekolah Dasar: Membangun Lingkungan Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Abdimas Indonesia*. https://doi.org/10.53769/jai.v4i4.1205

Puspandari, K., & Sinaga, Y. (2023). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*. https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8269

Qamaria, R. S., Pertiwi, F. H., Mulyani, L. N., Sari, N. N., Harriroh, A., Haq, I. N., Nasihatin, S. S., Erlangga, S. A., Anisahab, A., & Jannah, M. (2023). Upaya Menciptakan Lingkungan Sekolah Ramah Anak Melalui Kampanye Stop Bullying. *Kontribusi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. https://doi.org/10.53624/kontribusi.v4i1.265

Rahmattullah, M., Ratumbuysang, M. F. N. G., Iffansyah, M., Renita, R., Adawiyah, R., Setiawan, A., Bahar, S., Suratno, S., & Atmono, D. (2024). Edukasi Peningkatan Kesadaran Anti-Bullying dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Madrasah Aliyah Swasta Darul Huda, Desa Bawahan Pasar. *Pengabdian Masyarakat*. https://doi.org/10.20527/mswn4v32

Ramadhan, N. J. H., Sutiah, & Aziz, A. (2024). The implementation of inclusive education policy in indonesia: a literature review. *Esteem Journal of English Education Study Programme*. https://doi.org/10.31851/esteem.v7i1.15702

Ramadhan, R. A., & Torro, S. (2022). Peran Komite Sekolah Terhadap Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMPN 2 Parepare. *Pinisi Journal of Sociology Education Review.*. https://doi.org/10.26858/pjser.v1i2.23282

Riswari, F., Puspitasari, F. H., Yuniarti, N., Iswahyudi, S. R., Sunandar, A., Ediyanto, E., & Junaidi, A. R. (2022). The Management Gaps toward Inclusive Education Implementation at Higher Education in Indonesia. *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies*. https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2022.009.01.12

Ruiya, S., Kistoro, H. C. A., Sutarman, S., & Masduki, Y. (2023). Model of Religious Education for Slow Learner Children in Inclusive Schools in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.861

Saputri, M. A., Widianti, N., Lestari, S. A., & Hasanah, U. (2023). Ragam Anak Berkebutuhan Khusus. *Childhood Education Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. https://doi.org/10.53515/cej.v4i1.4986

Setiawan, A. I., Abidin, Y. Z., Rustandi, R., Sarbini, A., & Aziz, R. (2026). Transforming Religious Education Through Inclusivity: How Indonesian Pesantren Cultivate Moderate Islamic Values and Dawah Practices. *Nazhruna Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.31538/nzh.v9i1.406

Siswantara, Y., Sujata, D. T., & Setiawati, L. D. I. (2022). Inklusif: pertobatan ekologis melalui pendidikan karakter religius. *KASTRAL Kajian Sastra Nusantara Linggau*. https://doi.org/10.55526/kastral.v2i2.297

Sowiyah, S., & Perdana, R. (2022). Inclusive Education in Indonesia: Teachers Perceptions. *WSEAS TRANSACTIONS ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT*. https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.4

Sujarwanto, S., Saroinsong, W. P., Boonroungrut, C., & Purwoko, B. (2024). Special Education Teachers Perceived Work Stress, Burnout Symptoms, Towards Adoption of Transformational Teaching in Inclusive Schools: A Cross-Country Study Between Indonesia and Thailand. *European Journal of Educational Research*. https://doi.org/10.12973/eu-jer.13.3.1215

Sunardi, S., Prakosha, D., Sugini, S., Anwar, M., & Martika, T. (2024). Typical Challenges Faced by Sub-Urban State Primary Schools Implementing Inclusive Education in Indonesia.

International Journal of Learning Teaching and Educational Research. https://doi.org/10.26803/ijlter.23.3.23

Suryanto, H., & Youhanita, E. (2022). Pendidikan Yang Humanis Dengan Sistem Sekolah Ramah Anak. *Society Jurnal Pengabdian Masyarakat*. https://doi.org/10.55824/jpm.v1i4.131

Suvita, Y., Manullang, T. I. B., Sunardi, S., & Supriatna, M. (2022). Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*. https://doi.org/10.24036/jpkk.v6i2.601

Syavira, R., Suryanef, S., Hasrul, H., & Nurman, N. (2022). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 3 Padang Panjang. *Journal of Civic Education*. https://doi.org/10.24036/jce.v5i1.564

Tanjung, R., Setyosari, P., Sukmawati, E., Wirawan, R. N. L., & Aulia, R. (2024). Teknologi Pendukung dalam Pendidikan Inklusif: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis. *Nusantara Educational Review*. https://doi.org/10.55732/ner.v2i1.1168

Wardani, K., Prayogo, M. M., & Hangestiningsih, E. (2022). Penerapan program sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Fundadikdas (Fundamental Pendidikan Dasar)*. https://doi.org/10.12928/fundadikdas.v4i3.4891

Widiansyah, A., Saputra, R., & Fitriansyah, F. (2022). Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak melalui Sekolah Ramah Anak di SDN Setiajaya 02 Cabang Bungin Bekasi. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*. https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i10.7241

Xiao, E., Sun, M., Lv, K., Zhu, X., & Jia, W. (2023). Development and validation of Child-Friendly School Environment Questionnaire from Chinese culture. *Frontiers in Psychology*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1288085

Yasin, M. H. M., Susilawati, S. Y., Tahar, M. M., & Jamaludin, K. A. (2023). An analysis of inclusive education practices in East Java Indonesian preschools. *Frontiers in Psychology*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1064870

Yuniarni, D., Linarsih, A., Miranda, D., Halida, H., & Seli, S. (2023). Persepsi Guru TK terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pontianak. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.3615

Zanni, L., Restian, A., Faridah, F., & Safitri, F. (2025). Penguatan Literasi Digital Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Berbasis Teknologi Ramah Anak. *Journal Of Science, Education and Studies.*. https://doi.org/10.30651/jses.v4i3.29098

Zuhra, H. H., Filasofa, L. M. K., & Mursid, M. (2025). Implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Program Sekolah Ramah Anak PAUD. *Aulad Journal on Early Childhood*. https://doi.org/10.31004/aulad.v8i1.903